

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa merupakan wilayah terkecil dari suatu negara. Desa di Indonesia memiliki banyak potensi yang tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi tersebut dapat dikelola dengan baik dan semaksimal mungkin, maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa (Boediono,1993). Akan tetapi, saat ini pembangunan pada tingkat desa masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa dapat disebabkan sumber daya manusia diantaranya akibat pendidikan yang masih rendah dan persoalan permodalan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah untuk mengelola berbagai potensi ekonomi untuk kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa, sampai saat ini tidak diagendakan sebagai prioritas oleh pemerintah daerah. Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasal 214 tentang kerja sama antar desa, dapat dijadikan sebagai landasan/modal dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses memungkinkan dan memandirikan masyarakat.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, dengan

berdirinya BUMDes. Selanjutnya pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagian organisasi ekonomi. Perkembangan BUMDes tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Sumber pendapatan desa merupakan salah satu intsrumen untuk meningkatkan perekonomian desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu : kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan *Political will* kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun oleh BUMDes melalui kegiatan simpan pinjam. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui unit usaha desa, dimana dapat menjadi strategi dalam mengembangkan dan pemberdayaan desa.

Namun banyaknya permodalan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat dan membantu para warga desa, BUMDes memiliki peran yang sangat fundamental dalam memacu produktivitas ekonomi warga dan meningkatkan ekonomi desa melalui simpan-pinjam tersebut. Sehingga masyarakat desa tetap melakukan dan menerapkan program simpan pinjam yang telah di gerakkan oleh BUMDes. Selanjutnya, perkembangan desa yang berbasis masyarakat bisa terus menjadi perkembangan berkelanjutan dan tentu memerlukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola BUMDes yang berjalan saat ini.

Di masa sekarang masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal tersebut disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan sehingga sangat menguntungkan dari pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia didesa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada tahun-tahun sebelumnya mengakibatkan banyak potensi yang diberikan terbengkalai dan tidak dikembangkan untuk sumberdaya kemakmuran bagi masyarakat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mengklaim, sebanyak 10 persen BUMDes sudah bisa dikatakan maju, sisanya masih belum. Beliau menjelaskan, indikator BUMDes maju bisa dilihat dari tiga hal. Pertama, secara kelembagaan telah berjalan. Kedua unit usaha yang dijalankan telah mendapatkan untung. Dan terakhir mampu berkontribusi pada pendapatan asli desa.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh Budiono menyebutkan bahwa permasalahan implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2006 di Kabupaten Bojonegoro telah berdiri 419 BUMDes, dan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) pada tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah BUMDes yang masih berjalan hanya 121 BUMDes.

Dari pernyataan tersebut, memberikan gambaran bahwa implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan mampu memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan dana BUMDes masih belum berjalan maksimal. Hal ini bisa dilihat

dari usaha BUMDes yang dijalankan di desa yang hanya bisa mengakomodir sebagian masyarakat saja.

Menurut Kepala Desa Tanjungharjo, Pengelolaan BUMDes di Desa Tanjungharjo bisa dikategorikan cukup, karena masih belum mampu membantu seluruh masyarakat desa khususnya para petani dalam meningkatkan perekonomiannya melalui unit usaha Tanjungkarya dengan cara peminjaman sarana produksi usahatani (Benih padi, obat-obat pertanian, dan alat-alat pertanian), sesuai dengan pendapatan usaha petani tersebut dan dapat dibayar ketika sudah panen. Hal tersebut berbeda dengan bantuan dana lainnya seperti bantuan dari koperasi dan kelompok organisasi lainnya.

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai Ketua BUMDes, menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi petani Desa Tanjungharjo yaitu ketika melakukan peminjaman saprodi kepada unit usaha BUMDes petani merasa takut apabila tidak mampu membayar pinjaman akibat gagal panen dan BUMDes belum mampu membantu seluruh masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomiannya melalui peminjaman saprodi pada unit usaha Tanjungkarya.

Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penyebab petani tidak meminjam saprodi usahatani kepada BUMDes, dan pengaruh partisipasi peminjaman saprodi oleh petani, kontribusi dan efektivitas peminjaman saprodi terhadap pemberdayaan ekonomi petani dengan mengambil studi kasus di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes di bidang pertanian.

Berdasarkan penjelasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan di Desa Tanjungharjo melalui pemanfaatan BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi petani. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Pemberdayaan Ekonomi Petani Melalui Badan Usaha Milik Desa."

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Apakah penyebab petani tidak meminjam saprodi usahatani kepada BUMDes?
2. Bagaimana efektivitas peminjaman saprodi usahatani terhadap pemberdayaan ekonomi petani?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi peminjaman saprodi oleh petani, kontribusi, dan efektivitas peminjaman saprodi terhadap pemberdayaan ekonomi petani?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penyebab petani tidak meminjam saprodi usahatani kepada BUMDes.
2. Menganalisis efektivitas peminjaman saprodi usahatani terhadap pemberdayaan ekonomi petani.
3. Menganalisis pengaruh partisipasi peminjaman saprodi oleh petani, kontribusi, dan efektivitas peminjaman saprodi terhadap pemberdayaan ekonomi petani.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat, antara lain :

1. Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang menyangkut topik yang sama.

2. Sebagai bahan masukan dalam penetapan strategi dan kebijakan pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan meningkatkan efektivitas program BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi khususnya dibidang Pertanian.
3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar terdapat pembaharuan dari penelitian dengan tema sejenis.